

**ANALISIS RESEPSI PENGGUNA HUKUM TERHADAP CITRA
KEPOLISIAN TENTANG KASUS SUAP PASCA PEMBERITAAN
MARKUS OLEH MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI
DI MEDIA TELEVISI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana pada FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

EVIAN NUR UTAMI
0643210046

**YAYASAN KEJUANGAN PANGLIMA BESAR SUDIRMAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SURABAYA
2010**

**ANALISIS RESEPSI PENGGUNA HUKUM TERHADAP CITRA
KEPOLISIAN TENTANG KASUS SUAP PASCA PEMBERITAAN
MARKUS OLEH MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI
DI MEDIA TELEVISI**

Oleh:

EVIAN NUR UTAMI
0643210046

**Telah Dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal 11 Juni 2010**

Menyetujui,

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

1. Ketua

Dra. Dyva Claretta, M.Si
NPT. 3 6601 94 0025 1

Dra. Sumardjati, M.Si
NIP. 19620323 199309 2001

2. Sekretaris

Drs. Kusnarto, M.Si
NIP. 19580801 198402 1001

3. Anggota

Dra. Dyva Claretta, M.Si
NPT. 3 6601 94 0025 1

**Mengetahui,
DEKAN**

Dra. Ec. Suparwati, M.Si
NIP. 19550718 198302 2001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin ...

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan-Nya, maka Skripsi dengan judul **"Analisis Resepsi Pengguna Hukum Terhadap Citra Kepolisian Tentang Kasus Suap Pasca Pemberitaan Mantan Kabareskrim Susno Doadji di Media Televisi"** ini tidak dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menempuh studi Strata 1 (S1), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Sejak awal hingga terselesainya skripsi ini, peneliti mengakui banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disadari bahwa penulis tidak dapat melakukan sendiri tanpa bantuan beberapa pihak lain, ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada

1. Bpk. Juwito S.Sos, Msi., Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2. Dra. Ec. Hj. Suparwati, Msi., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Dra. Dyva Claretta, Msi., Dosen Pembimbing

4. Bapak dan Ibu Dosen, Program Diklat Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti
5. Untuk orang tua dan keluarga peneliti, terimakasih buat kepercayaan yang diberikan dan selalu memberikan doa-doa yang suci untuk mendukung segala aktifitas kegiatan peneliti.
6. Teman-teman d'BaseCamp: Farida, Dini, Tuffah, Rosi, Feta, Rina, Dion, Rere dan Farhan. Juga teman sejawat peneliti, Atika, Teddy dan kawan-kawan lainnya, *Keep Fight Guys .. God Always with us!!*
7. Untuk Gischa Restiana, yang telah memberi semangat dan membuat peneliti berfikir untuk tidak mudah menyerah dengan keadaan.
8. *Specialy for* PsikopatLife, yang sudah memancing peneliti untuk menemukan ide permasalahan yang diambil untuk skripsi.
9. Untuk para informan, yang bersedia untuk meluangkan waktu buat wawancara.
10. Serta semua pihak yang telah ikut serta untuk membantu hingga Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan dengan segera.

Dalam kehidupan di dunia tidak ada yang sempurna, seperti halnya manusia yang selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati, dengan seluruh kemampuan dan kekurangan, peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja serta memperluas wawasan untuk selalu kritis dalam setiap kehidupan yang dilalui. Amin.

Surabaya, Mei 2010

Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Reception Analysis</i>	11
2.1.2 Pengertian Suap	16
2.1.3 Pengertian Markus	18
2.1.4 Komunikasi Massa	20
2.1.5 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa	23
2.1.6 Pengertian Berita	25
2.1.7 Jenis Berita	29

2.1.8	Pengguna Hukum di Surabaya Sebagai Pemirsa Televisi	32
2.1.9	<i>Cultural Studies</i>	34
2.1.9.1	Pengaruh Budaya dalam Proses Pemaknaan Teks	34
2.2	Kerangka Berpikir	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1	Metode Penelitian	38
3.2	Subjek Penelitian	39
3.3	Unit Analisis	39
3.4	Sasaran penelitian	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data	40
3.5.1	Wawancara Mendalam (<i>Dept Interview</i>)	40
3.6	Teknik Analisis Data	43
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Gambaran Objek Penelitian	45
4.1.1	Pengguna Hukum	45
4.2	Analisis Data	46
4.2.1	Analisis Data	46
4.2.2	Analisis Data Wawancara.....	48
4.3	Interpretasi	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara	73
Lampiran 2. Hasil Wawancara	75
Informan 1	75
Informan 2	89
Informan 3	95
Informan 4	99
Informan 5	103
Lampiran 3. Lampiran Foto Wawancara	107

ABSTRAKSI

EVIAN NUR UTAMI. ANALISIS RESEPSI PENGGUNA HUKUM TERHADAP CITRA KEPOLISIAN MENGENAI KASUS SUAP PASCA PEMBERITAAN MARKUS OLEH MANTAN KABARESKRIM SUSNO DUADJI DI MEDIA TELEVISI

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi pada citra yang dimiliki oleh kepolisian. Citra merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari publik atau khalayaknya.

Penelitian ini menaruh pada perhatian pada masalah suap yang terjadi dalam tubuh kepolisian, terlebih setelah terbongkarnya kasus Makelar Kasus (Markus) dalam tubuh kepolisian pasca pemberitaan yang dilakukan oleh Mantan salah satu pejabat tinggi di Polri, yaitu Kepala Badan Reserse dan Kriminal Susno Duadji. Pada pemberitaan tersebut, Mantan Kabareskrim Susno Duadji menyatakan bahwa dalam tubuh Polri terdapat Makelar Kasus. Dalam pengungkapan yang dilakukan, mantan Kabareskrim tersebut, juga menunjuk tiga jendral kepolisian yang terlibat didalam Markus. Selain itu juga membuka kebenaran bahwa salah satu staff dari Dirjen Pajak Gayus Tambunan sebagai penerima aliran dana suap Rp. 24,6 Milyar. Raminya pemberitaan tersebut di televisi, dapat mempengaruhi pandangan masyarakat pengguna hukum terhadap citra kepolisian saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi yang termasuk dalam penelitian kualitatif.

Data yang dianalisis adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pengguna hukum di Surabaya. Hal ini dikarenakan selain Surabaya, adalah salah satu kota dengan penduduk terbesar kedua, di Surabaya terdapat Markas Kepolisian terbesar setelah Jakarta yaitu POLDA Jatim. yang memiliki pengalaman dalam berurusan hukum dan melakukan suap dan juga memiliki usia 21 tahun sampai 45 tahun. Wawancara tersebut dilakukan untuk semua golongan, tidak memandang jenis kelamin dan golongan tertentu.

Dalam penelitian ini menggunakan *cultural studies* dalam membentuk pemikiran individunya. *Cultural studies* terkait dengan semua praktek, institusi dan system klasifikasi yang tertanam dalam nilai-nilai, kepercayaan, kompetensi, rutinitas kehidupan dan bentuk-bentuk kebiasaan perilaku masyarakat. Sehingga menciptakan suatu pemikiran-pemikiran sendiri dalam satu individu, dalam mengartikan sebuah informasi yang didapatnya melalui media.

Dari data yang dianalisis, menyimpulkan bahwa citra kepolisian saat ini tidak pernah berubah dari dulu, yaitu tetap buruk di mata masyarakatnya. Terlebih dengan adanya kasus Markus yang terbongkar, hal membuktikan bahwa kepolisian belum mampu dalam meningkatkan citranya meskipun telah melakukan berbagai perbaikan di segala bidang yang ada didalamnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Citra perusahaan atau sebuah instansi merupakan suatu hal yang sangat sensitive untuk dibicarakan, karena dengan citra yang dimiliki, perusahaan atau instansi tersebut dapat merangkul maupun menjauhkan publiknya.

Pengertian citra saat ini masih sangat abstrak, akan tetapi wujudnya dapat dirasakan melalui penilaian baik atau buruk. Seperti penerimaan dan tanggapan baik atau positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya (Ruslan, 2002:74).

Apabila citra yang dimiliki perusahaan ataupun instansi baik dimata khalayak publiknya, baik internal public maupun eksternal public, maka perusahaan atau instansi tersebut dapat dengan mudah merangkul dan mengajak khalayaknya untuk mengembangkan perusahaan ataupun instansi tersebut. Dengan citra yang baik itulah maka khalayak memberikan tanggapan atau opini positif untuk perusahaan atau instansi terkait.

Namun apabila citra yang dimiliki buruk di mata khalayaknya, maka perusahaan atau instansi tersebut tidak mendapatkan dukungan yang positif dari khalayaknya. Dukungan yang tidak positif tersebut bisa

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah terjadinya demo atau mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja maupun masyarakat sekitar karena tidak setuju dengan satu atau lebih dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi untuk diterapkan.

Dalam hal ini, membina hubungan baik dengan khalayak public sangat diperlukan. Ini juga berkaitan dengan tanggung jawab social kepada publiknya, demi mewujudkan visi perusahaan. Berbagai macam cara membina hubungan baik tidak lah terlalu sulit untuk saat ini, karena banyak media yang mampu menyediakan fasilitas tersebut.

Namun membina hubungan baik dengan khalayak, tidak dapat dengan mudah dipraktekkan. Ini dikarenakan khalayak sasaran yang kita tuju adalah masyarakat luas. Yaitu yang terdiri dari sekelompok manusia yang selalu ber-evolusi dalam pemikiran setiap waktunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diketahuinya. Bahkan dapat di bilang bahwa masyarakat saat ini tidak dapat dibodohi lagi oleh informasi-informasi yang di berikan melalui media.

Saat ini, pertumbuhan media semakin mencolok di negara-negara berkembang, seperti yang terjadi di Indonesia. Diawali pada saat era reformasi, media semakin gencar dalam memberikan informasi untuk sebuah berita dan tergolong bebas.

Hal ini menimbulkan banyak pihak ingin membuka lahan keberuntungan di bidang media tersebut, sehingga baik dari media cetak maupun elektronik banyak yang bermunculan di Indonesia untuk

menjangkau khalayak sarannya. Terlebih lagi saat ini masyarakat mampu memilih medianya sendiri untuk kebutuhan wawasannya.

Sebagai manusia yang berevolusi, masyarakat harus mampu mengikuti suatu perkembangan tertentu untuk dapat mengembangkan potensi diri. Perkembangan media di Indonesia telah membuat banyak terbentuk stasiun-stasiun televisi baru. Dapat dicontohkan di Surabaya, masyarakat dapat menemui kurang lebih 15 (lima belas) stasiun televisi di Surabaya

Perkembangan media yang bisa di bilang pesat, merupakan salah satu usaha yang dapat diterapkan untuk membina hubungan tersebut. Sehingga khalayak masyarakat dapat mengetahui segala perkembangan informasi yang terjadi melalui media. Baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Dengan berkembangnya stasiun televisi di Indonesia, hal ini dijadikan suatu ajang kesempatan juga bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri melakukan pemberitaan informasi mengenai dirinya di media televisi. Media elektronik seperti televisi adalah media yang paling update dalam penyampaian informasi. Dengan media Televisi, Kepolisian mampu menyampaikan informasi-informasi yang ada dalam instansinya untuk diberitakan atau diberitahukan kepada masyarakatnya. Antara lain dapat ditemui salah satu program yang dimiliki oleh Kepolisian, untuk melayani pertanyaan masyarakat secara langsung dengan pembahasan tema tertentu, yaitu Hallo Polisi yang disiarkan oleh Indosiar.

Selain itu kepolisian juga sering melakukan sosialisasi programnya dalam media televisi, seperti adanya sosialisasi tentang kebijakan baru dari Kepolisian yang bekerja sama dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ). yaitu sosialisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang pernah disiarkan di Trans 7 dan JTV salah satu TV Local di Jawa Timur.

Citra yang melekat di mata masyarakat mengenai Instansi Kepolisian di nilai buruk. Baik dari segi perorangan (anggota Polisi), pelayanan kepada masyarakat bahkan sampai ke birokrasi hukumnya yang rumit.

Namun sejak 1 April 1999, yang secara kelembagaan Polri keluar dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), pihak kepolisian-pun mulai merubah fungsinya sebagai alat Negara untuk menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dengan semangat itulah, instansi kepolisian melakukan berbagai perubahan dalam meningkatkan kepercayaan publiknya.

Secara perlahan kepolisian berupaya meningkatkan citranya, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam peningkatan citra inilah, upaya-upaya peningkatan citra kepolisian digalakkan. Dengan memanfaatkan perkembangan media, pihak kepolisian sering melakukan pemberitaan mengenai kegiatan-kegiatannya melalui media elektronik maupun media cetak.

Berdasarkan laporan akhir tahun yang dirilis Ombudsman, pada tahun 2008, sebanyak 30,73% kinerja kepolisian menduduki peringkat

pertama yang paling dikeluhkan oleh masyarakat.

(<http://www.ombudsman->

[asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid](http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid)

[=1](http://www.ombudsman-asahan.org/index.php?option=com_content&task=view&id=845&Itemid)). Meskipun hal ini merupakan salah satu bukti bahwa citra kepolisian

dinilai buruk oleh masyarakat Indonesia, Reformasi yang dilakukan oleh

polisi dalam tubuh Instansi Kepolisian, masih terus menerus dilakukan.

Dengan semakin meyakinkan publiknya, salah satu upaya yang dilakukan

adalah dengan memuat statement kepolisian. Pada saat itu statement yang

di utarkan oleh Kapolwiltabes Surabaya dimuat oleh salah satu media

cetak di Surabaya. Pada 28 April 2008, Kapowiltabes Surabaya

menyatakan bahwa kepolisian menerapkan gerakan anti suap. Sejak saat

itu pula kegiatan-kegiatan polisi sering di beritakan di media cetak

tersebut.

Begitu banyak pemberitaan yang muncul mengenai kepolisian,

adalah salah satu terpaan bagi masyarakat pengguna hukum untuk dapat

mengubah pandangannya mengenai kepolisian yang lebih baik. Sebagai

pandangan masyarakat awam, mengenai pemberitaan Polri, saat ini polisi

benar-benar sudah melakukan reformasi yang dapat di bilang bagus.

Namun kenyataan yang ditemui dilapangan, tidak sepenuhnya

gerakan anti suap itu dilaksanakan. Masih banyak masyarakat yang

menganggap Polisi masih mudah untuk disuap dalam pelayanannya,

karena dalam kenyataannya terdapat kasus suap yang dijumpai di jalan.

Selain itu juga, pada beberapa waktu lalu telah terjadi beberapa kasus yang dapat dikatakan melibatkan pihak Polri, yaitu kasus Bank Century. Kasus tersebut melibatkan Kabareskrim Komisaris Jenderal (Pol) Susno Duadji sebagai salah satu yang terlibat dalam penyelewengan dana Century. Hal ini memaksa Kabareskrim Susno Duadji untuk mundur dari jabatannya sementara dan pada 24 November 2009, Kapolri resmi memberhentikan Komjen Susno Duadji dari jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim).

<http://news.okezone.com/read/2010/03/25/339/315877/susno-jadi-tersangka-polri-dinilai-kontraproduktif>

Namun ketika kasus Bank Century belum selesai secara keseluruhan, muncul satu kasus yang merupakan pernyataan dari Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji sendiri.

Kepada media, Mantan Kabareskrim Susno Duadji menyatakan bahwa dalam tubuh Polri terdapat Makelar Kasus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Markus. Dalam pengungkapan yang dilakukan, mantan Kabareskrim tersebut, juga menunjuk tiga jendral yang terlibat didalam Markus. Selain itu juga membuka kebenaran bahwa salah satu staff dari Dirjen Pajak Gayus Tambunan sebagai penerima aliran dana suap Rp. 24,6 Milyar.

Setelah melakukan pengakuan tersebut, Mantan kabareskrim tersebut, mendapatkan perlawanan dari pihak Polri. Yang menyatakan bahwa dalam tubuh Polri tidak ada praktek Markus atau Jenderal markus.

Dengan pertentangan itu, mantan salah satu petinggi Polri tersebut tidak diam. Namun seiring kasus tersebut diungkap oleh beliau ke media, Mantan kabareskrim tersebut merasa terancam dengan seringnya mendapat pesan ancaman terhadap dirinya melalui handphone. Mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Komisaris Jenderal Susno Duadji, mendatangi Komisi III (Komisi Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditemani empat pengacaranya untuk meminta perlindungan hukum ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal ini juga dikarenakan pada Jumat 26 Maret yang lalu Susno menolak untuk diperiksa Propam. Susno beralasan Propam menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2006. Menurut Susno, kedua Peraturan Kapolri itu tidak sah digunakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi dan disiplin kepada dirinya.

http://nasional.tvone.co.id/berita/view/35510/2010/03/30/susno_datangi_komisi_iii_dpr_minta_perlindungan_hukum/

Sampai saat ini, kasus yang bermula dari pernyataan Mantan Kabareskrim tersebut masih terus ditindak lanjuti. Dalam kasus ini melibatkan banyak pihak lembaga hukum Negara termasuk perpajakan didalamnya.

Apa yang dilakukan oleh Mantan Kabareskrim tersebut, dapat menimbulkan berbagai dugaan mengenai kepolisian dari masyarakat. Padahal seperti yang diketahui, bahwa Susno Duadji adalah salah seorang yang pernah menjadi pejabat tinggi di Polri sebagai Kabareskrim.

Ramainya pemberitaan mengenai markus tersebut di televisi, membuat masyarakat sebagai pengguna hukum yang berkaitan dengan pelayanan polisi setiap saatnya, dapat mengubah pandangannya kembali tentang kepolisian. Sehingga membuat pembangunan citra yang dilakukan oleh kepolisian yang telah dilaksanakan secara bertahap selama ini, bisa mendapatkan tanggapan negatif.

Dengan adanya pemberitaan ini pula, sikap masyarakat sebagai pengguna hukum pastilah bermacam-macam. Apalagi setelah pengakuan yang dilakukan oleh Susno Duadji, Instansi Kepolisian tidak fokus dalam mengusut kasus Markus yang terjadi didalamnya. Malah memutuskan Susno Duadji sebagai tersangka pencemaran nama baik Instansi Polri.

Keputusan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian ini, pastilah juga mendapatkan sikap yang berbeda-beda dari masyarakatnya. Karena menganggap polisi tidak mampu dalam memisahkan antara permasalahan intern dari anggotanya dengan masalah yang telah di ungkap dalam tubuh kepolisian sendiri, yang juga menyangkut kepentingan publik. (*Dialog Today, Metro TV*)

Dengan alasan tersebut, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul ***“Analisis Resepsi Pengguna Hukum Terhadap Citra Kepolisian Tentang Kasus Markus Pasca Pemberitaan Mantan Kabareskrim Susno Duadji di media Televisi”***.

Penelitian ini melibatkan pengguna hukum di Surabaya. Selain karena Surabaya adalah salah satu kota dengan penduduk terbesar kedua setelah Jakarta, di Surabaya terdapat pusat dari hukum kepolisian di Jawa Timur yaitu POLDA Jatim.

Peneliti juga menggunakan pengguna hukum yang hanya dibatasi oleh usia 21 – 45 tahun. Dalam undang-undang menentukan bahwa untuk dapat bertindak dalam hukum adalah seseorang yang telah dewasa. Menurut pasal 330 KUH. Perdata seorang dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun keatas atau telah kawin sebelum mencapai umur tersebut dan jika terjadi pembubaranperwakilan sebelum mereka berusia 21 tahun mereka tepat diakui dewasa.

Dalam psikologi pada usia 21 – 24 tahun sekarang sering disebut sebagai masa dewasa muda atau masa dewasa awal. Dalam dewasa awal ini individu mendapatkan hak dan tanggung jawabnya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara mendalam mengenai pemberitaan makelar kasus yang berkaitan kepolisian dalam pemberitaan di media massa, khususnya Televisi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *“Bagaimanakah Analisis Resepsi Pengguna Hukum Terhadap Citra Kepolisian Tentang Kasus Markus Pasca Pemberitaan Mantan Kabareskrim Susno Duadji di Media Televisi?”*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis resepsi pengguna hukum di Surabaya, mengenai citra Kepolisian setelah adanya pengakuan dari Mantan Kabareskrim Susni Duadji, mengenai makelar kasus yang sudah lama terjadi dalam tubuh Polri di Media Massa Televisi.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Menjadikan bahan informasi untuk dimanfaatkan dan dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut

b. Praktisi

- Menambah khasanah referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Menambah wawasan bagi masyarakat pengguna hukum di Surabaya, untuk kritis dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.